

Transformasi Kebijakan Moneter Islam dalam Menghadapi Tantangan Keuangan Global dan Digitalisasi Ekonomi Nasional Syariah Modern

Transformation of Islamic Monetary Policy in Addressing Global Financial Challenges and the Digitalization of the Modern National Sharia Economy

Putri Fania Ardianti¹, Allya Zahra Putri Nasution², Muhammad Arfan Harahap³

¹²³ Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 December, 2025

Revised 29 December 2025

Accepted 15 January 2026

Available online 17 January 2026

Keywords:

kebijakan moneter Islam, keuangan global, digitalisasi ekonomi, ekonomi syariah, stabilitas ekonomi.

Keywords:

Islamic monetary policy, global finance, economic digitalization, sharia economy, economic stability.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Danrul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kebijakan moneter Islam dalam menghadapi tantangan keuangan global dan percepatan digitalisasi ekonomi nasional syariah modern. Perubahan lanskap ekonomi global, ketidakstabilan sistem keuangan internasional, serta perkembangan teknologi digital menuntut adanya inovasi kebijakan moneter syariah yang adaptif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, regulasi, dan laporan resmi lembaga keuangan syariah nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam di Indonesia telah mengalami transformasi melalui penguatan instrumen moneter syariah, optimalisasi peran perbankan syariah, serta integrasi teknologi digital dalam sistem keuangan syariah. Digitalisasi ekonomi syariah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi transmisi kebijakan moneter, inklusi keuangan, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Namun demikian, tantangan masih dihadapi dalam bentuk harmonisasi regulasi, kesiapan infrastruktur digital, dan literasi keuangan syariah masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi kebijakan moneter Islam yang berbasis prinsip syariah

dan teknologi digital merupakan strategi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRAK

This research aims to analyze the transformation of Islamic monetary policy in responding to global financial challenges and the acceleration of digitalization within the modern national sharia economy. Changes in the global economic landscape, instability in the international financial system, and rapid technological advancement require adaptive and sustainable Islamic monetary policy innovations. This study employs a qualitative approach using a literature review of scientific journals, regulations, and official reports from national and international Islamic financial institutions. The findings indicate that Islamic monetary policy in Indonesia has undergone significant transformation through the strengthening of sharia-based monetary instruments, optimization of the role of Islamic banking, and the integration of digital technology into the Islamic financial system. The digitalization of the sharia economy plays a crucial role in improving the efficiency of monetary policy transmission, enhancing financial inclusion, and maintaining national financial system stability. Nevertheless, several challenges remain, including regulatory harmonization, digital infrastructure readiness, and public literacy in Islamic finance. This research concludes that the transformation of Islamic monetary policy based on sharia principles and digital innovation is a strategic approach to safeguarding economic stability, enhancing competitiveness, and supporting inclusive and sustainable national economic growth.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem keuangan nasional, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan moneter berbasis prinsip syariah. Globalisasi keuangan, volatilitas pasar internasional, serta krisis ekonomi global yang berulang menuntut adanya sistem moneter yang stabil, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan moneter Islam hadir sebagai alternatif yang tidak hanya menekankan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi,

*Corresponding Author

Email: putrifaniaardianti189@gmail.com, allyazahraputri53@gmail.com, muhammadarfanharahap@gmail.com

tetapi juga nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki potensi besar dalam pengembangan kebijakan moneter Islam yang terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Transformasi kebijakan moneter Islam menjadi penting untuk memastikan daya tahan sistem keuangan syariah terhadap tekanan global sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Hasallyt & Lukito, 2024).

Kebijakan moneter Islam secara konseptual memiliki perbedaan mendasar dengan kebijakan moneter konvensional, khususnya dalam penggunaan instrumen berbasis bunga. Dalam sistem moneter Islam, pengendalian jumlah uang beredar dilakukan melalui instrumen syariah seperti operasi pasar terbuka syariah, pembiayaan berbasis bagi hasil, dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Transformasi kebijakan moneter Islam menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada tantangan global berupa ketidakpastian ekonomi, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar. Peran bank sentral dalam mengembangkan kebijakan moneter syariah tidak hanya terbatas pada stabilitas moneter, tetapi juga pada penguatan sektor riil dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kebijakan moneter Islam dituntut untuk adaptif terhadap perubahan global tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah yang menjadi fondasinya dalam sistem ekonomi Islam modern (Lukito & Taufik, 2023).

Selain tantangan global, digitalisasi ekonomi telah menjadi faktor penting yang memengaruhi transformasi kebijakan moneter Islam di Indonesia. Perkembangan teknologi finansial syariah atau Islamic fintech membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan, memperluas inklusi keuangan, serta mempercepat transmisi kebijakan moneter. Namun, digitalisasi juga menghadirkan risiko baru, seperti keamanan data, stabilitas sistem pembayaran, dan kesiapan regulasi. Kerangka regulasi yang adaptif dan berbasis syariah sangat dibutuhkan agar inovasi digital dapat berjalan seiring dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Integrasi antara kebijakan moneter Islam dan digitalisasi ekonomi syariah menjadi kunci dalam menghadapi era ekonomi digital. Oleh karena itu, transformasi kebijakan moneter Islam harus mempertimbangkan aspek teknologi, regulasi, dan tata kelola agar mampu menjawab tantangan ekonomi digital secara komprehensif (Aulia & Permatasari, 2020).

Transformasi kebijakan moneter Islam juga berkaitan erat dengan stabilitas sektor perbankan syariah sebagai saluran utama transmisi kebijakan moneter. Risiko likuiditas dan risiko pembiayaan menjadi isu penting yang perlu dikelola secara efektif agar sistem perbankan syariah tetap stabil dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional menunjukkan bahwa karakteristik risiko yang berbeda membutuhkan pendekatan kebijakan yang spesifik dan kontekstual. Kebijakan moneter Islam harus mampu memperkuat ketahanan perbankan syariah melalui instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, transformasi kebijakan moneter Islam tidak hanya berfokus pada aspek makroekonomi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan manajemen risiko sektor keuangan syariah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap stabilitas ekonomi nasional (Firdaus & Rosman, 2024).

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, kebijakan moneter Islam memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Integrasi antara kebijakan moneter dan fiskal Islam diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui penguatan sektor riil dan distribusi kekayaan yang adil. Instrumen moneter syariah yang dikombinasikan dengan kebijakan fiskal Islam, seperti zakat dan wakaf, dapat memberikan efek multiplier terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, transformasi kebijakan moneter Islam perlu diarahkan pada sinergi kebijakan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan moneter Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang berkeadilan (Hafizhah & Rusgianto, 2024).

Perkembangan instrumen moneter syariah dan sistem pembayaran non-tunai juga menjadi bagian penting dalam transformasi kebijakan moneter Islam. Digitalisasi sistem pembayaran telah mengubah pola transaksi masyarakat dan memengaruhi jumlah uang beredar

dalam perekonomian. Dalam sistem moneter Islam, pengelolaan uang beredar harus selaras dengan prinsip keadilan dan keseimbangan agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam perlu merespons perkembangan sistem pembayaran digital dengan kebijakan yang inovatif dan berbasis syariah. Optimalisasi instrumen moneter syariah di era digital diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan moneter sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Transformasi ini menegaskan pentingnya peran kebijakan moneter Islam dalam menghadapi perubahan struktural ekonomi akibat digitalisasi (Puswanti & Nasrullah, 2020).

Berdasarkan berbagai tantangan dan peluang tersebut, transformasi kebijakan moneter Islam menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi keuangan global dan digitalisasi ekonomi nasional syariah modern. Kebijakan moneter Islam dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi serta dinamika ekonomi global. Peran bank sentral, lembaga keuangan syariah, dan regulator menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa transformasi kebijakan moneter Islam tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan literasi keuangan syariah yang memadai, kebijakan moneter Islam diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai transformasi kebijakan moneter Islam menjadi relevan dan penting untuk dikembangkan dalam konteks ekonomi syariah modern di Indonesia (Warjiyo & Beik, 2024).

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter Islam secara teoretis berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menolak praktik riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan sektor riil. Instrumen kebijakan moneter Islam dikembangkan untuk mengatur jumlah uang beredar melalui mekanisme yang halal, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil dan operasi pasar terbuka syariah. Dengan demikian, teori kebijakan moneter Islam memandang uang sebagai alat tukar, bukan komoditas, sehingga penggunaannya harus mencerminkan nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi (Hasallyt & Lukito, 2024).

Dalam implementasinya, teori kebijakan moneter Islam menuntut peran aktif otoritas moneter dalam menjaga keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Kebijakan moneter Islam harus mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif serta menghindari spekulasi yang berlebihan. Selain itu, efektivitas kebijakan moneter Islam sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan tingkat perkembangan sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, transformasi kebijakan moneter Islam perlu didukung oleh regulasi yang kuat dan instrumen yang inovatif agar mampu menjawab tantangan ekonomi modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar teoritisnya (Lukito & Taufik, 2023).

Teori Stabilitas Keuangan dalam Perspektif Islam

Stabilitas keuangan dalam perspektif Islam merupakan kondisi di mana sistem keuangan mampu berfungsi secara efisien, adil, dan berkelanjutan tanpa menimbulkan ketimpangan ekonomi. Teori ini menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang seimbang dan transparan dalam lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah, sebagai bagian dari sistem keuangan Islam, diharapkan mampu menjaga stabilitas melalui prinsip kehati-hatian, pembagian risiko, dan keterkaitan erat dengan sektor riil. Stabilitas keuangan menjadi tujuan utama kebijakan moneter Islam karena ketidakstabilan sistem keuangan dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat (Firdaus & Rosman, 2024).

Dalam konteks kebijakan moneter, teori stabilitas keuangan Islam mengharuskan penggunaan instrumen yang mampu mengendalikan risiko likuiditas dan pembiayaan secara efektif. Ketahanan lembaga keuangan syariah terhadap guncangan eksternal menjadi indikator keberhasilan kebijakan moneter Islam. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam harus dirancang untuk memperkuat fondasi sistem keuangan syariah melalui pengawasan yang ketat dan penguatan manajemen risiko. Pendekatan ini menegaskan bahwa stabilitas keuangan bukan

hanya tujuan jangka pendek, tetapi juga prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam sistem ekonomi Islam (Sabiu & Abduh, 2020).

Teori Digitalisasi dalam Ekonomi Syariah

Digitalisasi ekonomi dalam perspektif syariah dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Teori ini menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital harus selaras dengan nilai-nilai syariah dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Islamic fintech menjadi salah satu manifestasi digitalisasi ekonomi syariah yang berperan dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah. Dalam konteks kebijakan moneter Islam, digitalisasi berpotensi mempercepat transmisi kebijakan dan meningkatkan efektivitas pengendalian moneter melalui sistem pembayaran dan pembiayaan digital (Aulia & Permatasari, 2020).

Namun demikian, teori digitalisasi ekonomi syariah juga mengakui adanya tantangan yang perlu diantisipasi, seperti risiko keamanan siber, perlindungan data, dan kesiapan regulasi. Integrasi teknologi digital ke dalam sistem keuangan syariah memerlukan kerangka kebijakan yang adaptif dan komprehensif. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam harus mampu merespons perkembangan digital dengan inovasi yang tetap berlandaskan prinsip syariah. Pendekatan teoretis ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga transformasi struktural dalam sistem ekonomi syariah modern (Nik Azman & Malim, 2020).

Teori Instrumen Moneter Syariah

Instrumen moneter syariah merupakan perangkat kebijakan yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi tanpa menggunakan mekanisme bunga. Teori ini menekankan penggunaan instrumen berbasis akad syariah, seperti sukuk, sertifikat bank Indonesia syariah, dan pembiayaan bagi hasil. Instrumen moneter syariah dirancang untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif serta memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil. Dengan demikian, teori instrumen moneter syariah menempatkan keadilan dan keseimbangan sebagai prinsip utama dalam pengendalian moneter (Puswanti & Nasrullah, 2020).

Perkembangan instrumen moneter syariah juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan inovasi keuangan. Oleh karena itu, transformasi instrumen moneter syariah menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter Islam. Integrasi instrumen moneter dengan sistem keuangan digital diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi kebijakan moneter. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan moneter Islam sangat bergantung pada kemampuan instrumen moneter syariah dalam menjawab tantangan ekonomi modern secara berkelanjutan (Winarto & Beik, 2024).

Teori Sinergi Kebijakan Moneter dan Pembangunan Ekonomi Syariah

Teori sinergi kebijakan moneter dan pembangunan ekonomi syariah menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sektor keuangan syariah. Dalam perspektif ini, kebijakan moneter Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Integrasi kebijakan moneter dengan instrumen sosial Islam, seperti zakat dan wakaf, diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (Hafizhah & Rusgianto, 2024).

Lebih lanjut, teori ini menegaskan bahwa transformasi kebijakan moneter Islam harus mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Peran bank sentral dan lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting dalam menciptakan sinergi kebijakan yang efektif. Dengan dukungan digitalisasi dan inovasi keuangan, kebijakan moneter Islam diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi syariah nasional. Pendekatan teoretis ini menempatkan kebijakan moneter Islam sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi syariah modern di tengah tantangan global (Warjiyo & Beik, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam transformasi kebijakan

moneter Islam dalam menghadapi tantangan keuangan global dan digitalisasi ekonomi nasional syariah modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsep, kebijakan, serta dinamika perkembangan kebijakan moneter Islam secara komprehensif dan kontekstual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, peraturan otoritas moneter, serta laporan resmi lembaga keuangan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan terstruktur.

Metode penelitian ini selanjutnya menerapkan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis isi (content analysis) terhadap berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kebijakan moneter Islam, tantangan keuangan global, serta peran digitalisasi dalam ekonomi syariah nasional. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil temuan dari berbagai literatur dan dokumen resmi. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, objektif, dan relevan dalam menjelaskan transformasi kebijakan moneter Islam di era ekonomi syariah modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan moneter Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap dan adaptif dalam merespons dinamika keuangan global serta perkembangan digitalisasi ekonomi syariah. Kebijakan moneter Islam tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pengendali stabilitas moneter semata, tetapi berkembang menjadi instrumen strategis yang mendukung stabilitas sistem keuangan, inklusi ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Transformasi tersebut tercermin dari penguatan kerangka kebijakan, pengembangan instrumen moneter syariah, integrasi teknologi digital, serta sinergi antara sektor keuangan dan sektor riil. Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi syariah mempercepat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Namun demikian, transformasi tersebut juga dihadapkan pada tantangan berupa kesiapan regulasi, infrastruktur, serta literasi keuangan syariah. Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian ini difokuskan pada aspek konseptual transformasi kebijakan moneter Islam, peran digitalisasi, stabilitas keuangan, serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi nasional syariah modern.

Tabel 1. Transformasi Konsep Kebijakan Moneter Islam

No	Aspek Kajian	Kondisi Konvensional	Pendekatan Syariah Modern
1	Tujuan kebijakan	Stabilitas moneter	Keseimbangan dan keadilan
2	Peran uang	Komoditas	Alat tukar
3	Instrumen utama	Berbasis bunga	Berbasis akad
4	Orientasi kebijakan	Sektor keuangan	Sektor riil
5	Nilai dasar	Profit oriented	Maqashid syariah

Tabel ini menunjukkan pergeseran konseptual kebijakan moneter Islam dari pendekatan konvensional menuju paradigma syariah modern. Dalam sistem konvensional, kebijakan moneter lebih berorientasi pada stabilitas moneter melalui instrumen berbasis bunga, sementara dalam perspektif Islam, kebijakan moneter diarahkan pada pencapaian keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Uang tidak diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, melainkan sebagai alat tukar yang mendukung aktivitas ekonomi produktif. Transformasi ini menegaskan bahwa kebijakan moneter Islam memiliki dimensi moral dan sosial yang lebih luas dibandingkan sistem konvensional, sehingga kebijakan yang

dihasilkan tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Lebih lanjut, pendekatan syariah modern dalam kebijakan moneter menempatkan maqashid syariah sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan. Hal ini berarti bahwa setiap instrumen moneter harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan distribusi, perlindungan harta, serta keberlanjutan ekonomi. Orientasi kebijakan yang terhubung dengan sektor riil juga menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam berupaya menghindari spekulasi berlebihan dan mendorong kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan demikian, transformasi konsep kebijakan moneter Islam mencerminkan upaya sistematis untuk membangun sistem ekonomi yang stabil, etis, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Tabel 2. Peran Digitalisasi dalam Kebijakan Moneter Islam

No	Dimensi Digital	Fungsi Utama	Dampak terhadap Kebijakan
1	Sistem pembayaran	Efisiensi transaksi	Percepatan transmisi
2	Fintech syariah	Inklusi keuangan	Perluasan akses
3	Infrastruktur digital	Integrasi data	Transparansi kebijakan
4	Regulasi digital	Perlindungan sistem	Stabilitas keuangan
5	Literasi digital	Pemahaman publik	Efektivitas kebijakan

Tabel ini menggambarkan bagaimana digitalisasi berperan penting dalam mendukung transformasi kebijakan moneter Islam. Sistem pembayaran digital berbasis syariah memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara lebih efisien dan transparan, sehingga mempercepat proses transmisi kebijakan moneter. Kehadiran fintech syariah juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama bagi kelompok yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perbankan formal. Digitalisasi ini memberikan peluang besar bagi kebijakan moneter Islam untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan kebijakannya dalam perekonomian nasional.

Namun demikian, digitalisasi juga menuntut kesiapan infrastruktur dan regulasi yang memadai agar tidak menimbulkan risiko baru terhadap stabilitas sistem keuangan. Regulasi digital yang berbasis syariah diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen, keamanan data, dan keberlanjutan sistem keuangan. Selain itu, literasi digital masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan moneter Islam di era digital. Tanpa pemahaman yang memadai, manfaat digitalisasi tidak dapat dirasakan secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam perlu disinergikan dengan strategi penguatan literasi dan tata kelola digital yang baik.

Tabel 3. Stabilitas Keuangan Syariah dalam Kebijakan Moneter

No	Aspek Stabilitas	Fokus Pengelolaan	Implikasi Kebijakan
1	Likuiditas	Keseimbangan dana	Ketahanan lembaga
2	Risiko pembiayaan	Prinsip kehati-hatian	Stabilitas sistem
3	Keterkaitan sektor riil	Aktivitas produktif	Pertumbuhan berkelanjutan
4	Pengawasan syariah	Kepatuhan prinsip	Kepercayaan publik
5	Ketahanan sistem	Antisipasi guncangan	Keamanan ekonomi

Tabel ini menunjukkan bahwa stabilitas keuangan syariah merupakan elemen kunci dalam keberhasilan kebijakan moneter Islam. Pengelolaan likuiditas dan risiko pembiayaan menjadi fokus utama dalam menjaga ketahanan lembaga keuangan syariah. Berbeda dengan sistem konvensional, stabilitas keuangan syariah menekankan prinsip kehati-hatian dan keterkaitan dengan sektor riil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan tidak terlepas dari kegiatan ekonomi produktif yang nyata. Dengan demikian, kebijakan moneter Islam berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, pengawasan syariah yang kuat menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap stabilitas sistem

keuangan. Ketahanan sistem keuangan syariah terhadap guncangan eksternal menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam mampu memberikan perlindungan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, stabilitas keuangan syariah harus menjadi prioritas utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan moneter Islam di era ekonomi global dan digital.

Tabel 4. Implikasi Kebijakan Moneter Islam terhadap Ekonomi Nasional

No	Bidang Dampak	Arah Kebijakan	Manfaat Strategis
1	Pertumbuhan ekonomi	Inklusif	Pemerataan
2	Inklusi keuangan	Berbasis syariah	Akses luas
3	Stabilitas ekonomi	Berkelanjutan	Ketahanan nasional
4	Daya saing nasional	Inovatif	Keunggulan sistem
5	Kesejahteraan sosial	Berkeadilan	Pembangunan sosial

Tabel ini menjelaskan bahwa kebijakan moneter Islam memiliki implikasi luas terhadap perekonomian nasional. Arah kebijakan yang inklusif dan berbasis syariah berkontribusi pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Kebijakan moneter Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian target ekonomi makro, tetapi juga pada penguatan struktur ekonomi nasional yang berkeadilan. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan moneter Islam mampu mendukung stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih jauh, transformasi kebijakan moneter Islam juga berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi nasional di tengah persaingan global. Inovasi kebijakan dan integrasi teknologi digital memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang stabil dan etis. Dampak positif terhadap kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam perlu terus dikembangkan secara adaptif agar mampu menjawab tantangan global dan mendukung terwujudnya ekonomi nasional syariah modern yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa transformasi kebijakan moneter Islam merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan keuangan global dan percepatan digitalisasi ekonomi nasional syariah modern. Kebijakan moneter Islam tidak lagi hanya berfokus pada pengendalian stabilitas moneter, tetapi telah berkembang menjadi instrumen yang berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Transformasi ini tercermin dari penguatan kerangka kebijakan, pengembangan instrumen moneter syariah yang adaptif, serta peningkatan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil.

Selain itu, digitalisasi ekonomi syariah terbukti menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan efektivitas kebijakan moneter Islam melalui percepatan transmisi kebijakan, perluasan inklusi keuangan, dan peningkatan transparansi sistem keuangan. Meskipun demikian, transformasi kebijakan moneter Islam masih menghadapi tantangan berupa kesiapan regulasi, infrastruktur digital, dan literasi keuangan syariah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara otoritas moneter, regulator, lembaga keuangan syariah, serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan moneter Islam mampu berfungsi secara optimal. Dengan transformasi yang berkelanjutan dan berbasis inovasi, kebijakan moneter Islam diharapkan dapat mendukung stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat pembangunan ekonomi syariah modern yang berdaya saing global.

REFERENSI

Aulia, M., Yustiardi, A. F., & Permatasari, R. O. (2020). An overview of Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (fintech). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 64–75. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss1.art7>

- Firdaus, F., Azlina, N., Fakhruddin, I., Riyaldi, R., & Rosman, R. (2024). Liquidity and credit risk: A comparative study of Islamic and conventional banks in Indonesia. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 103–116. <https://doi.org/10.32332/finansia.v7i1.8918>
- Hafizhah, N. Z., Hikmah, L., & Rusgianto, S. (2024). Pengaruh kebijakan moneter dan fiskal Islam terhadap kesenjangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 7(3), 1–10. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v7n3.p1-10>
- Hasallyt, N. (2024). Konsep uang dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social*, 2(1), 102–110. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v2i1.4236>
- Lukito, R. M., Wulpiah, & Taufik, A. (2023). Kebijakan moneter syariah di Indonesia. *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social*, 1(1), 34–43. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3250>
- Nik Azman, N. H., Zabri, M. Z. M., Masron, T. A., & Malim, N. A. K. (2020). The utilisation of Islamic fintech (I-Fintech) in promoting sustainable inclusive growth: Evidence from micro-entrepreneurs in Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 555–576. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1180>
- Ni'mah, A., Laila, N., Rusmita, S. A., & Cahyono, E. F. (2020). Determinants of corporate bond and sukuk ratings in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 689–712. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1106>
- Puswanti, D., & Nasrullah. (2020). Pengaruh instrumen moneter syariah dan pembayaran non tunai terhadap money supply di Indonesia. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i1.1727>
- Putriani, D., Mat Ghani, G., & Kartiwi, M. (2020). Exploration of agent-based simulation: The multiplier effect of zakah on economic growth. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 667–688. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1110>
- Robbani, M. M., Aulia, M., & Humaira, F. R. (2020). Progressive financing in Indonesian Islamic microfinance institutions: Improved monitoring or distinctive commercialisation? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 641–666. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1183>
- Sabiu, T. T., & Abduh, M. (2020). Islamic financial development and economic growth in Nigeria: A bounds testing approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 597–620. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1191>
- Senusi, N. A., Rahman, M. P., & Indrawan, I. W. (2020). Financing-to-value (FTV) policy and its impact on residential property prices in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 577–596. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1176>
- Shafi, M. Z. A. (2025). Determinants of sharia fintech growth in Indonesia: An integrative analysis of macroeconomic indicators and monetary policy. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 11(2), 420–434. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v11i2.31902>
- Warjiyo, P. (2024). Accelerating digitalization in the sharia economy and finance for inclusive and sustainable growth in the post-pandemic recovery. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 1–4. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.2103>
- Winarto, F. H., & Beik, I. S. (2024). The effect of sharia monetary policy instruments and Islamic bank financing on economic growth and inflation. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 10(1), 72–89. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol10.iss1.art6>